



Original Article

Polemik Batas Wilayah: Analisis Pemberitaan Pemindahan 4 Pulau Aceh Ke Sumut di Media Nasional

Nuzrul Ikhwanussofa^{1✉}, Muhammad Syahminan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Author: nuzrulo603211013@uinsu.ac.id✉

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana media nasional membingkai isu pemindahan administrasi empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini memicu polemik karena dianggap menyentuh aspek sensitif terkait batas wilayah, identitas lokal, dan otonomi khusus Aceh. Menggunakan pendekatan kualitatif kritis dan analisis wacana kritis model Fairclough, penelitian ini menelaah 20 artikel dari empat media nasional, yaitu Kompas.com, Detik.com, CNN Indonesia, dan Media Indonesia, yang terbit bulan Juni 2025. Temuan menunjukkan bahwa pemberitaan media nasional lebih banyak merepresentasikan perspektif administratif dan legalistik dari pemerintah pusat, sembari menyingkirkan dimensi historis dan kultural masyarakat Aceh. Pilihan diksi, pelabelan aktor, dan narasi dominan dalam pemberitaan memperlihatkan kecenderungan ideologis yang sentralistik. Penelitian ini menegaskan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai produsen wacana yang dapat memperkuat atau melemahkan posisi daerah dalam struktur kekuasaan nasional. Oleh karena itu, diperlukan praktik jurnalisme yang lebih peka terhadap isu-isu lokal, agar pemberitaan mampu mencerminkan keberagaman identitas dan aspirasi masyarakat secara adil.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Kata kunci: framing media, wacana kritis, konflik batas wilayah, identitas lokal, Aceh–Sumatera Utara.

Pendahuluan

Masalah batas wilayah merupakan isu sensitif yang menyangkut integritas administratif, identitas lokal, serta legitimasi pemerintahan daerah. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang kompleks, persoalan tapal batas antar daerah kerap kali menimbulkan polemik, baik dalam ranah hukum, politik, maupun sosial budaya. Salah satu kasus ([Suriadi et al., 2023](#)) terkini yang mencuat ke ruang publik adalah pemindahan administrasi empat pulau yang semula berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Provinsi Aceh ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Tokong Belayar menjadi objek sengketa administratif setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri)

Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa wilayah-wilayah tersebut berada dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, bukan lagi Kabupaten Aceh Singkil.

Keputusan ini memicu gelombang penolakan, terutama dari elemen pemerintahan Aceh, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut tidak hanya mencederai sejarah dan identitas lokal masyarakat Aceh Singkil, tetapi juga melemahkan semangat otonomi khusus yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh melalui berbagai pernyataan resmi menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat, yang dinilai tidak melibatkan pemerintah provinsi secara substantif dalam proses penetapan batas wilayah. Beberapa pihak juga mengaitkan persoalan ini dengan minimnya transparansi data geospasial, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kecenderungan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan strategis tanpa pendekatan partisipatif terhadap daerah.

Di tengah dinamika ini, media massa nasional memainkan peran penting dalam mengangkat isu ke publik. Media berfungsi bukan sekadar sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai aktor yang membentuk persepsi publik, mempengaruhi opini, dan bahkan menentukan arah diskursus publik. Menurut Hall (1980), media tidak pernah benar-benar netral; ia membingkai realitas dengan bahasa, narasi, dan ideologi tertentu (Wachid., 2024). Dengan demikian, pemberitaan media terhadap isu pemindahan empat pulau ini menjadi objek yang strategis untuk dikaji secara kritis.

Pendekatan analisis wacana kritis (AWK) menjadi relevan dalam menelaah pemberitaan media terkait polemik ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana media membingkai suatu peristiwa melalui pilihan kata, struktur narasi, penekanan aktor tertentu, serta bagaimana relasi kuasa dan kepentingan ideologis terselubung di balik teks pemberitaan. Fairclough (1995) menyebut bahwa bahasa media merupakan medan perjuangan ideologis antara berbagai kepentingan (Fathurokhmah., 2023). Dalam konteks ini, bagaimana media nasional menggambarkan posisi Aceh, pemerintah pusat, dan Sumatera Utara menjadi indikator penting dalam melihat apakah media mereproduksi wacana dominan atau justru memberi ruang bagi narasi alternatif.

Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks politik kewilayahan di Indonesia pasca-reformasi, yang ditandai oleh meningkatnya tuntutan otonomi daerah dan penguatan identitas lokal. Provinsi Aceh memiliki status istimewa yang diakui oleh undang-undang, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah. Maka dari itu, isu pemindahan wilayah bukanlah sekadar soal administratif, melainkan berimplikasi pada legitimasi politik dan emosional masyarakat setempat. Media yang mengangkat isu ini, secara langsung atau tidak, juga menjadi bagian dari konstruksi identitas politik yang sedang dipertarungkan.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti bagaimana media mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu sengketa wilayah. Framing media terhadap konflik batas wilayah antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih banyak menekankan pada aspek administratif dan nasionalisme, namun cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat lokal (Ariyani et al., 2025). Studi lain oleh Abdullah et al (2022) menemukan bahwa pemberitaan media nasional cenderung bias terhadap narasi yang menguntungkan pemerintah pusat dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara spesifik bagaimana media nasional saat ini memberitakan isu empat pulau Aceh dalam konteks relasi pusat-daerah dan kepekaan identitas kultural.

Sejumlah media nasional seperti Kompas.com, Detik.com, CNN Indonesia, dan Media Indonesia telah memberitakan isu ini dengan narasi yang beragam. Ada media yang menekankan legalitas administratif dan integrasi nasional, sementara yang lain menyoroti ketegangan politik pusat-daerah serta rasa kehilangan masyarakat Aceh. Contohnya, "Argumentasi Provinsi Aceh menjelaskan bahwa sejak 1965 dan seterusnya sudah memiliki kedekatan historis dengan masyarakat Aceh, sedangkan Provinsi Sumut secara geospasial sangat dekat. Maka narasinya tidak hanya soal data empiris, tetapi juga nilainya asas persatuan, keadilan, dan sejarah", (Detik.com, 16 Juni 2025). "JK menegaskan bahwa pengalihan wilayah tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan Menteri (Kepmendagri), melainkan harus didasarkan pada perubahan undang-undang dan memperhatikan bukti historis serta praktik administratif masyarakat yang selama ini membayar pajak ke Aceh

Singkil, bukan ke Sumut”, (Kompas.com, 13 Juni 2025). “Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mendorong agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera berdialog dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) untuk mengetahui duduk perkara terkait peralihan administrasi empat pulau yang sedang menjadi polemik publik”, (Media Indonesia, 12 Juni 2025). “Saya minta Mendagri untuk segera mengembalikan pulau tersebut ke Provinsi Aceh, ujar anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, ketika dimintai tanggapan atas polemik penetapan administratif yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dek Gam menilai keputusan itu telah menimbulkan kegaduhan dan menyalahi semangat otonomi Aceh”, (CNN Indonesia, 11 Juni 2025).

Implikasi dari pemberitaan media ini cukup besar, baik bagi Aceh maupun Sumatera Utara. Bagi Aceh, keputusan ini menimbulkan konflik batas wilayah yang kompleks dan sensitif yang menyangkut identitas wilayah dan rasa keadilan, serta dapat memperdalam kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Sementara bagi Sumatera Utara, perluasan wilayah administratif seperti ini membawa tantangan baru dalam hal tata kelola, pelayanan publik, dan potensi gesekan sosial di wilayah perbatasan. Di sisi lain, media turut berperan dalam membentuk cara publik melihat dan memahami konflik ini apakah sebagai persoalan teknis administratif, atau sebagai konflik relasi kuasa yang lebih dalam.

Dalam kajian ini, penulis akan menganalisis pemberitaan beberapa media nasional seperti Kompas.com, Detik.com, CNN Indonesia, dan Media Indonesia dalam bulan Juni 2025. Analisis akan difokuskan pada bagaimana struktur naratif dibentuk, siapa yang diberi suara (voice) dalam pemberitaan, bagaimana pelabelan terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana posisi Aceh sebagai daerah dengan kekhususan diberitakan. Selain itu, akan dilihat pula bagaimana media menempatkan konflik ini dalam peta besar isu nasional, apakah sebagai sekadar isu lokal atau memiliki dimensi politik yang lebih luas.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan menekankan pada analisis wacana kritis (AWK) sebagaimana dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pendekatan ini tidak hanya berupaya memahami teks sebagai konstruksi linguistik semata, tetapi juga menelusuri bagaimana teks mencerminkan, memperkuat, atau bahkan menantang relasi kuasa yang berlangsung dalam masyarakat (Sari et al., 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menggali lebih dalam bagaimana wacana media tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis yang berperan dalam membentuk pemahaman publik terhadap isu-isu sensitif seperti konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.

Objek penelitian ini adalah pemberitaan media nasional mengenai polemik pemindahan administrasi empat pulau yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Aceh, namun kini secara administratif dicatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sumber data utama berasal dari berita-berita yang diterbitkan oleh media arus utama seperti Kompas.com, Detik.com, CNN Indonesia, dan Media Indonesia. Pemilihan media ini didasarkan pada jangkauan nasional, kredibilitas publik, serta pengaruhnya dalam membentuk opini masyarakat. Rentang waktu analisis Juni 2025, periode di mana isu ini mulai mendapat perhatian luas baik dari masyarakat maupun media. Fokus utama akan diarahkan pada berita utama (headline), opini (op-ed), dan editorial yang secara langsung membahas persoalan empat pulau yang dipindahkan dari Aceh ke Sumut.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka terhadap teks-teks berita yang relevan dengan topik. Pencarian berita dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci seperti empat pulau Aceh, Tapanuli Tengah, polemik batas wilayah, Aceh kehilangan pulau, Sumut rebut wilayah, dan variasi lain yang mengandung makna serupa. Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan cakupan berita yang luas serta memetakan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik.

Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada tiga tahapan utama dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough, yaitu analisis teks, analisis praktik diskursif, dan analisis praktik sosial. Pada tahap analisis teks, fokus diberikan pada struktur bahasa,

pilihan diksi, metafora, serta konstruksi kalimat yang digunakan dalam berita ([Kabanga et al., 2023](#)). Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membingkai suatu isu, dan aspek-aspek mana dari realitas yang ditonjolkan atau disembunyikan oleh media. Selanjutnya, dalam tahap analisis praktik diskursif, peneliti menelaah bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi berita tersebut terjadi, termasuk siapa aktor-aktor yang dominan, bagaimana posisi media terhadap aktor-aktor tersebut, dan sejauh mana wacana yang dibangun mencerminkan relasi kuasa tertentu. Pada tahap terakhir, yaitu praktik sosial, peneliti merefleksikan konteks sosial, politik, dan historis yang lebih luas yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut. Di sini, penekanan diberikan pada relasi pusat-daerah, dinamika politik identitas lokal, serta bagaimana media terlibat dalam memediasi atau bahkan memperkeruh persoalan-persoalan sensitif ini.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis 21 artikel berita dari empat media nasional, yaitu Kompas.com, Detik.com, CNN Indonesia, dan Media Indonesia, yang terbit pada Juni 2025. Dalam waktu tersebut, pemberitaan mengenai polemik pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang cukup intens. Pulau-pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Tokong Nanas yang secara administratif dipindahkan dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pemetaan ulang batas wilayah. Dari total berita yang dianalisis, dominasi tema administratif dan legitimasi hukum lebih banyak dimunculkan, sementara aspek historis, kultural, dan identitas lokal masyarakat Aceh justru sering kali diabaikan atau disubordinasikan.

Tabel 1. Analisis Naratif Media Berdasarkan Jumlah Artikel dan Fokus Pemberitaan Polemik 4 Pulau Aceh (Juni 2025)

No	Judul Berita	Media	Tanggal Terbit	Fokus Naratif Dominan
1	Duduk Perkara Kusut 4 Pulau Jadi Rebutan Aceh dan Sumut	Detik.com	12 Juni 2025	Riwayat data dan administratif wilayah; versi Kemendagri dominan
2	Beragam Respons Pejabat soal 4 Pulau Aceh Diputuskan Masuk Wilayah Sumut	Detik.com	1 Juni 2025	Tanggapan elite lokal dan nasional terhadap penetapan administratif
3	Polemik 4 Pulau Aceh Masuk Sumut Dituntaskan Prabowo Pekan Depan	Detik.com	15 Juni 2025	Intervensi Presiden sebagai pemutus akhir konflik daerah
4	Menanti Keputusan Prabowo soal 4 Pulau Aceh Masuk Sumut	Detik.com	15 Juni 2025	Eskalasi politik menanti keputusan pusat
5	Pekan Ini Keputusan Prabowo soal Polemik 4 Pulau Aceh–Sumut Diumumkan	Detik.com	16 Juni 2025	Finalisasi konflik administratif oleh pusat
6	Yusril: 4 Pulau Aceh Lebih Dekat ke Sumut, tapi Ada Faktor Sejarah	Detik.com	16 Juni 2025	Perdebatan antara kedekatan geografis vs historis dan budaya
7	Istana Sebut Usulan Pemindahan 4 Pulau Aceh Bukan dari Pemprov Sumut	Detik.com	29 Juni 2025	Klarifikasi aktor pengusul; pembelaan politik pusat
8	Kata Bupati Tapteng Masinton soal Isu 4 Pulau Aceh Hadiah untuk Sumut	Detik.com	27 Juni 2025	Bantahan terhadap narasi politisasi hadiah daerah

9	Mualem Ungkap Alasan 4 Pulau Direbut: Kandungan Gas Sama Besar di Andaman	Detik.com	26 Juni 2025	Dugaan motif ekonomi di balik konflik wilayah
10	Benarkah Ada Kandungan Migas di 4 Pulau yang Jadi Rebutan?	Detik.com	27 Juni 2025	Investigasi kandungan SDA di wilayah sengketa
11	Pembahasan 4 Pulau Masuk Sumut Sejak Puluhan Tahun Lalu	Detik.com	25 Juni 2025	Sejarah panjang wacana pemindahan wilayah
12	Mendagri Pindahkan 4 Pulau Aceh ke Sumut, JK: Itu Cacat Formil	Kompas.com	13 Juni 2025	Kritik formil terhadap keputusan pusat dari elite nasional (JK)
13	Pemindahan 4 Pulau ke Sumut, Kemendagri Dinilai Abaikan Fakta Sejarah	Kompas.com	13 Juni 2025	Sentimen historis dan aspirasi lokal Aceh
14	Adu Bukti Muzakir Manaf dan Mendagri soal 4 Pulau di Aceh Masuk Sumut	Kompas.com	13 Juni 2025	Pertentangan data legal dan politik antara tokoh Aceh vs pemerintah pusat
15	Aceh Enggan ke PTUN soal 4 Pulau: Jika Tak Mempan ke Prabowo	CNN Indonesia	16 Juni 2025	Jalur non-litigasi dan tekanan politik kepada presiden
16	Yusril: Keputusan Mendagri Picu Kehebohan 4 Pulau Aceh–Sumut	CNN Indonesia	17 Juni 2025	Respons akademik-politik terhadap keputusan kontroversial
17	Anggota DPR Minta Tito Kembalikan 4 Pulau dari Sumut ke Aceh	CNN Indonesia	11 Juni 2025	Desakan legislatif atas kesalahan kebijakan administratif
18	4 Pulau Aceh Dicaplok Sumut, Diduga Ada Pengaruh Jokowi	Media Indonesia	12 Juni 2025	Dugaan muatan politik dalam keputusan pemindahan wilayah
19	Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut, KPPOD: Regulasi Otonomi Daerah Harus Diperjelas	Media Indonesia	12 Juni 2025	Evaluasi UU Otonomi sebagai akar konflik administratif
20	JK: 4 Pulau yang Disengketakan Milik Aceh, Sesuai UU Nomor 24 Tahun 1956	Media Indonesia	15 Juni 2025	Legitimasi yuridis wilayah Aceh menurut Undang-Undang
21	Menkum: Bola Polemik 4 Pulau Aceh–Sumut di Kemendagri	Media Indonesia	14 Juni 2025	Pemerintah pusat menekankan Kemendagri sebagai pemegang kendali akhir

Sumber: Hasil dokumentasi dan analisis berita daring (Juni 2025) berdasarkan kata kunci: Empat pulau Aceh, Tapanuli Tengah, batas wilayah, dan pemindahan pulau.

Aktor-aktor yang paling sering muncul dalam pemberitaan antara lain adalah perwakilan pemerintah pusat (Mendagri, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan), pemerintah daerah (terutama Pemprov Aceh, Pemkab Aceh Singkil, dan Pemprov Sumut), aparat keamanan (TNI-AL dan Polri), serta masyarakat lokal yang memprotes melalui aksi demonstrasi atau pernyataan sikap. Di sisi lain, narasi yang muncul sering kali menggambarkan posisi Aceh sebagai pihak yang belum memahami administrasi batas wilayah dibandingkan narasi perjuangan atas dasar identitas dan sejarah lokal.

Dalam bingkai pemberitaan media nasional, isu ini cenderung diposisikan sebagai persoalan teknis administratif ketimbang problem relasi kekuasaan atau identitas. Framing yang muncul di sebagian besar berita lebih menekankan pada klarifikasi pemerintah pusat

dan upaya pemerintah menertibkan batas wilayah sesuai aturan, daripada memberi ruang yang setara bagi aspirasi masyarakat Aceh. Kompas.com, misalnya, dalam beberapa artikelnya memberi ruang cukup besar kepada pernyataan Kemendagri dan lembaga teknis pemetaan, sementara aspirasi masyarakat lokal hanya ditampilkan secara singkat dalam bentuk kutipan tanpa pendalaman. CNN Indonesia cenderung menampilkan narasi konflik sebagai kegaduhan yang perlu ditertibkan, dengan menonjolkan tindakan TNI-AL sebagai penjamin stabilitas. Detik.com sesekali mengangkat aspirasi masyarakat Aceh, namun tetap dalam bingkai netral yang tidak terlalu menggugat status quo. Media Indonesia cukup berimbang, tetapi lebih banyak berfokus pada aspek politis di level elite, bukan dari perspektif akar rumput.

Dalam kerangka analisis wacana kritis, penggunaan bahasa dalam teks berita mencerminkan posisi ideologis yang tidak netral. Pemilihan istilah seperti pemindahan administratif, hasil pemetaan, dan protes warga menyiratkan adanya pembingkaihan yang menyederhanakan kompleksitas persoalan. Istilah protes warga, misalnya, seolah menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor reaktif, bukan sebagai pemilik klaim historis yang sah. Sementara itu, istilah hasil pemetaan ulang yang berulang kali digunakan justru menegaskan keabsahan versi negara tanpa menyertakan kritik terhadap metode atau proses pengambilan keputusan. Terdapat pula pelabelan yang menyiratkan delegitimasi terhadap narasi lokal, seperti penggunaan frasa klaim sepihak masyarakat Aceh atau emosi massa.

Strategi representasi media juga menunjukkan adanya generalisasi terhadap posisi pemerintah pusat sebagai pelindung konstitusi dan aturan, sementara masyarakat lokal direpresentasikan sebagai pihak emosional yang tidak memahami hukum administrasi. Ini terlihat dalam diksi yang menggambarkan pemerintah sebagai penengah, pemberi kejelasan, dan penjaga kedaulatan wilayah, yang mengandung muatan ideologis sentralistik. Pada saat yang sama, aspirasi masyarakat Aceh yang menganggap pulau-pulau tersebut sebagai bagian integral dari identitas kultural dan sejarah mereka jarang diperdalam atau dikontekstualisasikan secara kritis. Tidak ditemukan narasi yang mengangkat sejarah keterikatan etnis dan ekonomi masyarakat Aceh dengan empat pulau tersebut secara sistematis.

Struktur ideologis pemberitaan tampak berpihak pada narasi negara-bangsa yang menempatkan batas administratif sebagai parameter tunggal dalam menilai keabsahan wilayah. Kecenderungan ini dapat dilacak dalam praktik diskursif media yang lebih sering mengutip pejabat pusat ketimbang masyarakat lokal atau akademisi daerah. Dalam beberapa kasus, media bahkan menggunakan foto-foto TNI-AL yang berjaga di pulau-pulau tersebut, yang secara visual memperkuat wacana stabilitas dan legitimasi negara. Sementara, representasi visual terhadap warga Aceh yang memprotes hanya muncul dalam konteks demonstrasi, tanpa narasi yang membingkai mereka sebagai subjek politik yang rasional dan berdaulat.

Implikasi dari pemberitaan semacam ini cukup signifikan. Di tingkat masyarakat Aceh, muncul ketidakpercayaan terhadap media nasional yang dianggap tidak mewakili suara lokal. Sentimen keterasingan dari narasi kebangsaan yang diusung negara diperkuat oleh pemberitaan yang tidak mengakomodasi sejarah dan identitas mereka secara adil. Hal ini dikuatkan oleh temuan bahwa hanya sebagian kecil dari berita yang menyertakan pendapat tokoh adat, akademisi Aceh, atau lembaga masyarakat sipil setempat. Sementara itu, masyarakat Sumatera Utara cenderung menyambut pemberitaan ini secara normatif sebagai bagian dari perluasan wilayah administratif, tanpa memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kontroversi yang menyertainya. Akibatnya, terjadi pembelahan persepsi yang dapat mengganggu kohesi sosial di antara masyarakat dua provinsi yang sebenarnya memiliki sejarah interaksi panjang.

Dari sisi relasi pusat-daerah, framing media yang sentralistik dan administratif justru mengukuhkan kembali dominasi pusat dalam penentuan batas wilayah. Padahal, dalam konteks otonomi daerah, semestinya isu seperti ini melibatkan partisipasi aktif dan dialog setara antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Pemberitaan yang cenderung mengabaikan nuansa ini berpotensi mereproduksi ketimpangan relasi kuasa antara Jakarta dan daerah-daerah yang memiliki sejarah otonomi khusus seperti Aceh. Wacana dominan

yang dibentuk media nasional turut membentuk persepsi publik bahwa keberatan masyarakat Aceh tidak berdasar dan emosional, padahal bisa jadi merupakan ekspresi kegelisahan terhadap marginalisasi identitas kultural dan kedaulatan simbolik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sensitivitas media dalam membingkai isu-isu batas wilayah yang sarat muatan historis, politik, dan kultural. Media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk realitas dan posisi ideologis melalui pemilihan kata, struktur narasi, dan representasi aktor. Ketika realitas lokal hanya muncul sebagai latar atau pelengkap narasi administratif, maka media sedang berperan aktif dalam mendisiplinkan wacana publik sesuai kepentingan dominan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi jurnalisme di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi yang menghargai pluralitas, keadilan informasi, dan pengakuan terhadap identitas lokal sebagai bagian dari konstruksi kebangsaan.

Kesimpulan

Pemberitaan media nasional terkait pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara cenderung membingkai isu ini dalam perspektif administratif dan legalistik, dengan mengabaikan dimensi historis, kultural, dan identitas lokal masyarakat Aceh. Media lebih banyak merepresentasikan narasi pemerintah pusat, sementara suara masyarakat lokal termarginalkan. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak netral, tetapi turut mereproduksi relasi kuasa yang sentralistik. Diperlukan praktik jurnalisme yang lebih adil dan sensitif terhadap isu-isu lokal agar tidak memperkuat ketimpangan representasi dalam diskursus kebangsaan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga aktor yang membentuk wacana dan mereproduksi relasi kuasa dalam ruang publik. Representasi yang tidak seimbang ini berpotensi memperlemah posisi daerah dalam diskursus nasional dan memperbesar kesenjangan kepercayaan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan praktik jurnalisme yang lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap realitas lokal agar media dapat berfungsi sebagai ruang demokratis yang mencerminkan keberagaman suara masyarakat.

Referensi

- Abdullah, K., Fitriani, E., Sulehan, J., & Anuar, R. (Eds.). (2022). *Malaysia-Indonesia: Perbezaan Identiti dalam Hubungan Sebangsa* (UUM Press). UUM Press.
- Alandira, P., Mardiyansyah, Y., Hildansyah, I., & ... (2025). Analisis Framing Pemberitaan Kematian Presiden Iran di Aljazeera. net dan Alarabiya. net. *MUKASI: Jurnal Ilmu ...*, 4(2), 212–226. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4311>
- Amsalis, Y. (2022). *Antonio Gramsci Sang Neo Marxis*. BASABASI.
- Ariyani, N., & Latief, S. S. (2025). Analisis Framing Berita Ibu Kota Nusantara di Kaltimtoday.co Framing Analysis of Nusantara Capital News at Kaltimtoday.Co. *Cite This: J.SST*, 4(2), 230–240. <http://journal.unifa.ac.id/index.php/jssehttp://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>
- CNN Indonesia (2025, 11, Juni) "Anggota DPR Minta Tito Kembalikan 4 Pulau dari Sumut ke Aceh" di akses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250611122749-32-1238531/anggota-dpr-minta-tito-kembalikan-4-pulau-dari-sumut-ke-aceh>
- Detik.com (2025, 16, Juni) "Kemendagri Evaluasi Menyeluruh soal Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut" di akses dari: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7966123/kemendagri-evaluasi-menyeluruh-soal-polemik-sengketa-4-pulau-aceh-sumut>.
- Fathurokhmah, F. (2023). *WACANA KRITIS KLAIM KEBENARAN ISU KEAGAMAAN MASA KRISIS DI MEDIA SOSIAL*-Damera Press. Damera Press.
- Gaspersz, R., Pelamonia, M., Izaak, D., Yoris, J., Ilmu, S., Fisip, K., Kristen, U., & Maluku, I. (2024). *Vol 6 No 2 November 2024 E-ISSN : 2722 - 3248*. 6(2).
- Kabanga, L., Tabuni, S., & Kalangi, A. N. (2023). Ideologi dalam pesan paskah 2023: pendekatan analisis wacana kritis dengan model Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian*

- Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(4), 1095–1110.
<https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i4.792>
- Kompas.com (2025, 13, Juni) "Mendagri Pindahkan 4 Pulau Aceh ke Sumut, JK: Itu Cacat Formil" di akses dari: <https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/06/13/225631688/mendagri-pindahkan-4-pulau-aceh-ke-sumut-jk-itu-cacat-formil>.
- Marbun, R. (2021). Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu. *Esensi Hukum*, 3(1), 20–40.
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.37>
- Media Indonesia (2025, 12, Juni) "Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, KPPOD: Regulasi Pembentukan Daerah Otonomi Harus Diperjelas" di akses dari: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/781712/sengketa-4-pulau-aceh-sumut-kppod-regulasi-pembentukan-daerah-otonomi-harus-diperjelas?utm_source=chatgpt.com
- Ramadhani, S., & Musawir, M. (2025). Bahasa Dan Kekuasaan Dalam Pemberitaan Isu Buruh Perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *AUFKLARUNG: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pembelajarannya*, 1(2), 138–146.
- Sari, W. P., Setyonegoro, A., & Priyanto. (2025). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pemberitaan Internasionalisasi Bahasa Indonesia Di Media Antaranews.com. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, Dan Sastra*, 3(1), 366–380.
<https://doi.org/10.59638/isolek.v3i1.417>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.
<https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Syahputra, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Politik Identitas dan Perlawanan Kolektif terhadap Otoritas : Studi Kasus Polresta Deli Serdang*. 5(1), 71–80.
- Ulina Malau, R. M., & Khairunnisa. (2023). Komodifikasi Kasus Korupsi; Framing Media Operasi Penangkapan Wali Kota Bandung oleh Kompas.com dan CNN.Indonesia. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 175–181.
<https://doi.org/10.35326/medialog.v6i2.4657>
- Wachid, A. (2024). *Dimensi Profetik Dalam Puisi Gusmus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan*. Nuansa Cendekia.